

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK

Ratna Ningsih

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura
Pontianak

ABSTRACT

The purpose of this study was to understand the quality of the financial statements of the Public Service Agency (PSA) of Poltekkes Kemenkes Pontianak from the perspective of the Government Internal Control System (GICS), Accounting Information Systems (AIS), and Human Resources Competency. The study method of analysis used qualitative method that aimed to see the quality and understand its financial reports from those perspectives through observation, documentation of the PSA of Poltekkes Kemenkes Pontianak financial statements, as well as interviews with several informants directly related to the preparation of the PSA of Poltekkes Kemenkes Pontianak financial reports. The results showed that the quality of it had relevant, reliable, comparable and understandable qualities. From the perspective of GICS, the financial statements of the Poltekkes Kemenkes Pontianak already have reliable quality. In the preparing financial statements process involving accounting information systems that have been well designed so it becomes faster, on time and avoids data invalidity. Human resource competence in the preparing financial statements process of PSA Poltekkes Kemenkes Pontianak has involved employees who have accounting education backgrounds, have an understanding in operating financial management information systems. Resulting in can improve the quality of financial statements.

Keywords: *Quality of Public Service Agency Financial Statements; Government Internal Control Systems; Accounting Information Systems; Human Resources Competence.*

1. Latar Belakang

Reformasi Keuangan Negara yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik (good governance) diantaranya prinsip transparansi dan akuntabel. Akuntabilitas yang berarti setiap satuan kerja termasuk Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang berkualitas. Kriteria untuk menilai laporan keuangan yang

berkualitas menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami (PP No. 71, 2010). Apabila ke empat kriteria tersebut dapat dipenuhi dengan baik maka akan memberikan dampak yang baik pula terhadap kualitas Laporan Keuangan PK-BLU.

Poltekkes Kemenkes Pontianak merupakan salah satu institusi yang berstatus PK-BLU sejak tanggal 1 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.05/2011. Sejak berstatus PK-BLU, Poltekkes Kemenkes Pontianak harus dapat menyediakan dan menyajikan informasi keuangan dan akuntansi secara benar dan wajar sesuai dengan ketentuan peraturan BLU. Baik tidaknya pengelolaan keuangan yang dilakukan instansi pemerintah seperti PK-BLU dapat dilihat dari kualitas laporan keuangannya, semakin baik pengelolaan keuangan maka kualitas laporan keuangan pun akan meningkat sehingga memberikan dampak yang positif terhadap opini BPK-RI.

Fenomena yang terjadi bahwa laporan keuangan yang berkualitas diperoleh oleh Instansi Pemerintah salah satunya PK-BLU hanya untuk mendapatkan predikat opini BPK-RI yaitu predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun demikian masih ada Instansi Pemerintah yang mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disebabkan oleh laporan keuangan yang belum berkualitas, oleh karena untuk itu perlu pemahaman bagaimana menilai kualitas laporan keuangan sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Selain itu untuk mampu menyediakan dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas terdapat 3 faktor yang dianggap harus dimiliki PK-BLU antara lain Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif, Sistem Informasi Akuntansi yang dirancang dengan baik, dan Sumber Daya Manusia yang berkompeten.

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan instansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, dapat dicapai dengan diselenggarakannya sistem pengendalian intern yang dapat memberikan keyakinan memadai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, tercapainya keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, mendorong ketaatan terhadap perundang-undangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pradono dan Basukianto (2015) bahwa semakin baik SPIP maka semakin baik kualitas laporan keuangan SKPD. Penelitian yang dilakukan Syarifudin (2014) menemukan bahwa SPIP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, karena dengan adanya pengendalian internal yang efektif akan dapat meminimalisir resiko kesalahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan

sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Sistem Informasi Akuntansi merupakan satu sistem yang akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) menjadi suatu cara dalam memberikan kemudahan dalam hal pengolahan data yang akurat, efisien, dan terjamin keamanannya, dapat mentransformasikan data keuangan menjadi informasi berkualitas yang dibutuhkan. Menurut Zulfah, Wahyuni dan Nurfaza (2017) Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Andini dan Yusrawati (2015) dimana hasil kajiannya juga menunjukkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan berkualitas yang berbasis akrual memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi, khususnya dibidang akuntansi pemerintahan. Tidak dapat dipungkiri SDM merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam suatu satuan kerja atau organisasi. pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan dibidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada semua jenjang pemerintahan yaitu berdasarkan Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana didalamnya terdapat hal yang mengatur tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di jenjang pemerintahan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Yudianta dan Erawati (2012), Mahaputra dan Putra (2014) dan Udiyanti et al (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal metode yang digunakan dan objek penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya hampir semuanya menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sementara hasil dari metode tersebut hanya bisa menjelaskan, hubungan atau tidak ada hubungan antara berbagai faktor penjelas dengan kualitas laporan keuangan. Metode tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan bagaimana hubungan itu ada, selain itu penelitian tentang bagaimana menilai kualitas laporan keuangan masih sedikit. Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian ini dengan harapan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian sejenis. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini dimaksudkan untuk menilai kualitas laporan keuangan BLU serta untuk memahami kualitas laporan keuangan BLU dari perspektif Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Begitu pentingnya menilai kualitas laporan keuangan serta pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk **menilai kualitas laporan keuangan Badan Layanan Umum serta memahami kualitas laporan keuangan Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Pontianak dari perspektif Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia .**

Berdasarkan uraian latarbelakang yang dikemukakan diatas, maka yang jadi pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana kualitas laporan keuangan Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Pontianak serta bagaimana kualitas laporan keuangan Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Pontianak dari perspektif Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia .

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kualitas laporan keuangan Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Pontianak serta untuk memahami kualitas laporan keuangan Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Pontianak dari perspektif Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

2. Kajian Literatur

1) Badan Layanan Umum

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220 Tahun 2016, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU adalah suatu unit kerja di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan kegiatannya berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2) Laporan Keuangan BLU

Laporan keuangan menurut Albertus Indratno (2013): “Laporan keuangan dapat dipandang dalam dua perspektif, maka akuntansi didefinisikan ke dalam sudut pandang yaitu pandang pengguna jasa akuntansi dan proses kegiatan yang terjadi”. Pelaporan keuangan BLU diatur dalam regulasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 220/PMK.05/2016.

3) Kualitas Laporan Keuangan BLU

Laporan keuangan yang berkualitas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan karakteristik kualitas laporan keuangan yaitu bersifat relevan, andal, dapat dipahami, dapat dibandingkan dan memiliki kelengkapan informasi mengenai laporan keuangan.

a. Relevan, Informasi yang relevan harus memiliki 4 kriteria yaitu:

a) Memiliki manfaat umpan balik

Dimana informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi dimasa lalu.

b) Memiliki manfaat (*predictive value*)

Informasi bisa membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil kejadian dimasa lalu dan kejadian dimasa sekarang.

c) Tepat waktu

Informasi yang tepat waktu merupakan informasi yang disajikan tepat waktu sehingga dapat berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah telah disajikan secara lengkap apabila informasi tersebut mencakup semua informasi akuntansi yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

b. Andal

Andal mempunyai arti informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan meterial, menyajikan setiap fakta dengan jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang handal memiliki karakteristik yaitu informasi yang disajikan menggambarkan transaksi yang seharusnya disajikan secara wajar dan jujur, informasi yang disajikan dapat diuji, informasi yang disajikan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dipahami

Dapat dipahami berarti Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat di pahami sesuai dengan batas pemahaman para pengguna informasi tersebut.

d. Dapat dibandingkan

Dapat dibandingkan berarti Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sesuai PP 60 Tahun 2008 , Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari 5 unsur, yaitu :

- (a) Lingkungan Pengendalian, Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008: Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan serta dapat memelihara lingkungan pengendalian sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: Penegakan integritas dan nilai etika, Komitmen terhadap kompetensi, Kepemimpinan yang kondusif, Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat, Pembinaan sumber daya manusia sesuai dengan kebijakan, Peran APIP yang efektif, Memiliki hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang terkait.
- (b) Penilaian Resiko, Menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko, yang terdiri atas identifikasi resiko dan analisis resiko.
- (c) Kegiatan Pengendalian, Menurut Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 “ Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan yang terdiri atas: Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, Pembinaan sumber daya manusia, Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, Pengendalian fisik atas asset, Pemisahan fungsi, Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja, dilakukan dengan cara menetapkan ukuran dan indikator kinerja serta mereviu secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja, Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, Pencatatan yang dilakukan secara akurat dan tepat waktu atas transaksi, Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, Akuntabilitas terhadap sumber daya dan

pencatatannya , Dokumentasi yang baik atas dokumen sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

(d) Informasi dan Komunikasi, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008: Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Penyelenggaraan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya dapat menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, mengelola, mengembangkan, memperbaiki sistem informasi secara terus menerus.

(e) Pemantauan, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008: Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan melalui : Pemantauan berkelanjutan, diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu dan pengujian efektivitas sistem pengendalian internal, Evaluasi terpisah, dapat dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah atau pihak ekstern pemerintah, Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin (2014) menemukan bahwa SPIP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, karena dengan adanya pengendalian internal yang efektif akan dapat meminimalisir resiko kesalahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Penelitian yang dilakukan oleh Afifah dan Rahmatika (2014) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

5) Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terdiri dari 3 elemen dasar yaitu Sistem, Informasi dan Akuntansi. Sistem merupakan satu kesatuan dari dua atau lebih komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi adalah data yang telah diorganisasi dan diproses untuk memberikan makna kepada pengguna. (Romney dan Steinbart, 2009)

Menurut Romney dan Steinbart (2009) Fungsi Sistem Informasi Akuntansi dalam suatu organisasi adalah sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan menyimpan data dari aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan agar dapat meninjau ulang perihal yang telah terjadi
- b) Merubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan
- c) Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset yang dimiliki oleh organisasi termasuk data organisasi untuk memastikan bahwa aset-aset dan data tersedia saat dibutuhkan dan data tersebut akurat dan andal.

Tujuan sistem informasi akuntansi menurut Wilkinson (2000,p8-10), dapat terbagi menjadi tiga, yaitu :

- 1) *To support the day-to-day operations* (untuk mendukung operasi sehari-hari)
- 2) *To support decision making by internal decision makers* (untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pembuat keputusan internal)
- 3) *To fulfill obligations relating to stewardship* (untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan penyediaan informasi yang bersifat perintah kepada pihak eksternal perusahaan, juga menyediakan informasi kepada pemegang saham).

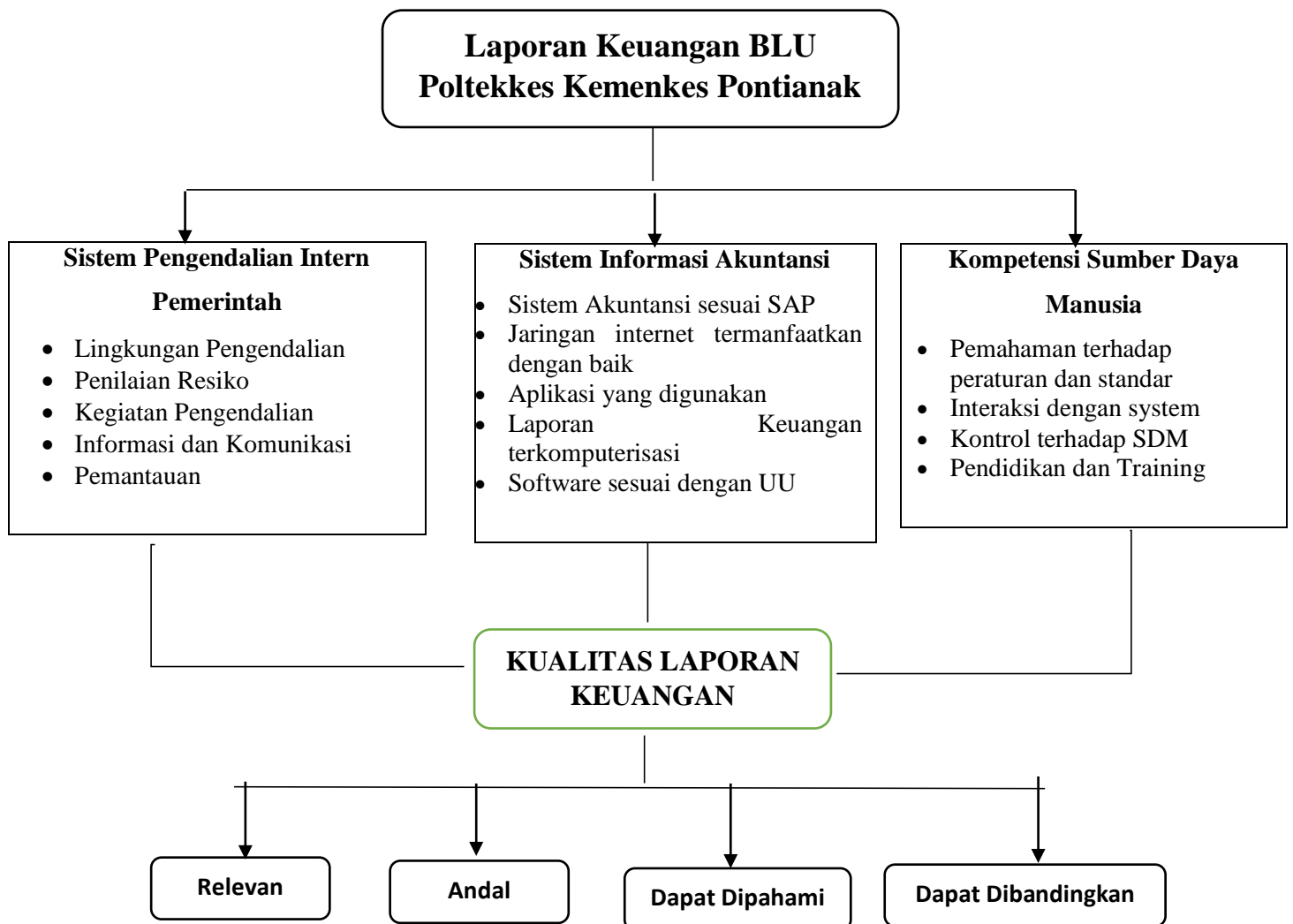
Penelitian yang dilakukan oleh Untary dan Ardiyanto (2015) menyatakan bahwa SIA berpengaruh positif terhadap laporan keuangan daerah. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Tawakal dan Suparno (2017) Penerapan SIA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD, laporan keuangan yang dihasilkan dari suatu proses penginputan yang baik, proses yang baik dan output yang baik dapat dijadikan pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik dan berkualitas.

6) Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia merupakan *human capital* dalam organisasi. *Human capital* merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan economic rent. *Human capital* merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan dengan human capital tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompetensi tinggi (Sugeng dan Imam, 2000 dalam Sutaryo, 2011). Sumber Daya Manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan,

dan mempunyai pengalaman dibidang pengelolaan keuangan yang baik (Warisno, 2008) hal ini sangat diperlukan untuk menerapkan sistim informasi akuntansi yang ada.

Semakin tinggi kompetensi dari sumber daya manusia yang terlihat dari kemampuan dan keterampilannya, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangannya. Teori ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Yudianta dan Erawati (2012), Mahaputra dan Putra (2014), Udiyanti et al (2014) , Untary dan Ardiyanto (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar
Kerangka Proses berfikir
Sumber : dikembangkan untuk penelitian

3. Metodologi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2005: 60) menyatakan bahwa penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan metode studi kasus karena peneliti ingin memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kualitas laporan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak serta memahami kualitas laporan keuangan BLU dari perspektif sistem pengendalian internal pemerintah, sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer berupa pengumpulan data yang diperoleh bukan dari instansi, melainkan berasal dari observasi langsung ke lapangan. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan para informan yang telah ditentukan yang meliputi Wakil Direktur II, Ka.Sub.Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum, Koordinator Keuangan, Penyaji data Laporan Keuangan BLU, Auditor Internal, dan Bendahara Poltekkes Kemenkes Pontianak. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yang dihimpun oleh peneliti berupa literatur, seperti jurnal, buku, *website*, dan data pendukung lain yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. **Teknik analisis data antara lain :**

- a. Reduksi data, merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulannya dapat ditarik dan diversifikasi.
- b. Penyajian data: sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Penarikan kesimpulan (Verifikasi); Hasil wawancara (data) dari informan kemudian ditarik kesimpulannya (sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian) sehingga jelas maknanya.

Uji keabsahan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah :

- a. Ketekunan pengamatan; bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian

memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

- b. Pengecekan melalui data rekaman, misalnya: video kamera, tape recorder, kamera photo atau handycam misalnya dapat digunakan sebagai alat perekam yang datanya dimanfaatkan untuk menguji kredibilitas hasil penelitian
- c. Triangulasi; sebagai salah satu teknik pemeriksaan data secara sederhana dapat disimpulkan sebagai upaya untuk mengecek data dalam suatu penelitian.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi pada BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak khususnya bagian pengelolaan dan penyusun laporan keuangan , untuk tercapainya akuntabel, transparan dan keandalan laporan keuangan dapat dicapai dengan di selenggarakannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan amanat pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Sistem Informasi Akuntansi yang dirancang dengan baik sesuai dengan PMK 220/PMK.05/2016 dan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi pemerintahan. Dengan adanya hubungan 3 variabel tersebut memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan BLU. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan peneliti atas kualitas laporan keuangan BLU Poltekkes Pontianak maka dapat disimpulkan bahwa pengelola keuangan di Poltekkes Kemenkes Pontianak telah memahami proses penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) hal ini dapat dibuktikan dengan adanya laporan keuangan yang berkualitas berdasarkan PP 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

1) Kualitas Laporan Keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak

a. Relevan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap laporan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2017 sampai dengan 2019 :

- a) Laporan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) ditunjukkan dengan mampunya laporan keuangan BLU mengoreksi ekspektasi masa lalu dimana angka realisasi pendapatan tahun berjalan dapat digunakan untuk menetapkan dan meningkatkan target pendapatan tahun berikutnya.
- b) Laporan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak dapat digunakan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian

masa kini.

- c) Penyajian laporan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak sudah lengkap sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 dimana terdapat tujuh (7) laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan
- d) Penyajian laporan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak tepat waktu.

b. Andal

Berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap laporan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak Tahun 2017, 2018, 2019 peneliti menilai bahwa laporan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2017, 2018, 2019 memiliki kualitas andal karena :

- a) Laporan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak telah disajikan secara jujur dapat diuji dan bebas dari kesalahan yang bersifat material karena telah reviu oleh SPI sebelum disampaikan ke PK-BLU Kemenkeu, Kementerian Kesehatan dan DJPB Provinsi.
- b) Penyajian angka- angka dalam laporan telah melalui tahapan rekonsiliasi data dengan KPPN yang dilakukan setiap bulan.
- c) Laporan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan

Berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap laporan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak Tahun 2017, 2018, 2019 peneliti menilai bahwa laporan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2017,2018,2019 memiliki kualitas dapat dibandingkan atau komperatif dimana laporan keuangan BLU Poltekkes telah disajikan dengan menggunakan kebijakan akuntansi dan sistem prosedur yang sama yaitu PSAP 13 dan PMK nomor 220/PMK.05/2016, sehingga dapat dibandingkan perjenis laporan pada laporan keuangan periode sebelumnya.

d. Dapat di pahami

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap laporan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2017 sampai dengan 2019 mudah dipahami oleh pihak pengguna laporan keuangan karena informasi nya selalu dijelaskan di Catatan atas Laporan Keuangan secara jelas dan terperinci, baik itu angka-angka yang dicapai, maupun kebijakan akuntansi yang lakukan. Berdasarkan hal tersebut maka

laporan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak telah memenuhi kualitas mudah dipahami sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

2) Kualitas Laporan Keuangan BLU dari perspektif Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Berdasarkan PP no 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), bahwa untuk mencapai tujuan instansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, dapat dicapai dengan diselenggarakannya sistem pengendalian intern pemerintah yang dapat memberikan keyakinan memadai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, tercapainya keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, mendorong ketaatan terhadap perundang-undangan.

Berdasarkan perspektif sistem pengendalian intern pemerintah laporan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak telah memiliki kualitas andal, karena SPI di Poltekkes Kemekes Pontianak telah melakukan 5 unsur SPIP sehingga memiliki dampak yang sangat penting terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan adanya SPIP dapat memberikan keyakinan atas penyelenggaraan kegiatan di Poltekkes Kemenkes Pontianak dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien, melaporkan informasi keuangan secara akurat dan andal, mengamankan aset negara dan mendorong ketaatan terhadap perundang-undangan, sehingga dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi , mampu mengidentifikasi kecurangan / *fraud* sejak dini dalam pengelolaan keuangan.

3) Kualitas Laporan Keuangan BLU dari perspektif Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Berdasarkan PMK No. 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum menyatakan bahwa sistem akuntansi BLU adalah serangkaian prosedur secara manual dan komputerisasi dari mulai pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan BLU.

Berdasarkan perspektif sistem informasi akuntansi bahwa dengan berkembangnya teknologi informasi memudahkan Poltekkes Kemenkes Pontianak melaksanakan tugas dan fungsinya. Akurasi dan ketepatan waktu pengambilan keputusan pimpinan di Poltekkes Kemenkes Pontianak dapat ditingkatkan dengan bantuan teknologi komputer. Oleh karena itu pemanfaatan sistem informasi akuntansi

yang digunakan di Poltekkes Kemenkes Pontianak harus berkembang agar dapat meningkatkan akurasi input, proses, dan output dari pengelolaan sistem informasi akuntansi, dapat meningkatkan pengamanan data, serta dapat menekan resiko kesalahan dalam pengelolaan sistem informasi akuntansi sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh Poltekkes Kemenkes Pontianak memiliki kualitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

4) Kualitas Laporan Keuangan BLU dari persepektif Kompetensi Sumber Daya Manusia

Untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan berkualitas yang berbasis akrua memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, khususnya dibidang akuntansi pemerintahan. Manusia atau SDM menjadi salah satu faktor yang penting karena manusia memiliki karakter dan kapasitas untuk menjalankan proses dengan menggunakan sistem yang ada. Sumber daya manusia merupakan aset Poltekkes Kemenkes Pontianak yang harus dikelola sebaik mungkin. Poltekkes Kemenkes Pontianak telah membangun kebijakan dan prosedur sumber daya manusia sesuai dengan aturan perilaku dan nilai etika salah satunya meningkatkan kompetensi pegawai, hanya saja belum seluruhnya pegawai Poltekkes Pontianak mendapatkan pelatihan khusus, hanya mendapatkan bimbingan teknis saja.

5. Simpulan, Rekomendasi

1) Laporan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak Tahun 2017 sampai dengan 2019 memiliki kualitas yang baik karena laporan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak sudah memenuhi unsur kriteria normatif kualitas laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan sesuai dengan ukuran normatif kualitas laporan keuangan pada Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

- 2) Berdasarkan perspektif sistem pengendalian intern pemerintah, laporan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak telah memiliki kualitas yang dapat diandalkan, karena dalam proses penyusunan laporan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak telah disajikan dengan jujur, dapat diuji serta netral yang melibatkan satuan pengawas intern sebagai sistem pengendalian internal pemerintah sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan atas resiko yang kemungkinan akan muncul dalam proses penyusunan laporan keuangan.
- 3) Berdasarkan perspektif sistem informasi akuntansi, laporan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak telah memiliki kualitas relevan karena, dalam proses penyusunan laporan keuangan melibatkan sistem informasi akuntansi yang telah dirancang dengan baik sehingga proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih cepat, tepat waktu dan terhindar dari ketidakvaliditan data.
- 4) Berdasarkan perspektif kompetensi sumber daya manusia, dalam proses penyusunan laporan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak telah melibatkan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, memiliki pemahaman dalam mengoperasikan sistem informasi pengelolaan keuangan, serta memiliki tanggungjawab terhadap jabatan yang di emban sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan kesimpulan dan analisis yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

- 1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan oleh karena itu kesadaran akan pentingnya pengendalian intern pemerintah di Poltekkes Kemenkes Pontianak ini tidak boleh hanya menjadi tanggungjawab pimpinan namun tersebar ke seluruh pegawai, tidak hanya sampai kepada unit dan bagian instansi saja melainkan harus sampai ke individu sehingga pengendalian intern bisa berjalan lebih efektif dalam mencapai tujuan BLU.
- 2) Sistem Informasi Akuntansi di Poltekkes Kemenkes Pontianak harus dikembangkan dan dijalankan secara efektif, karena dengan adanya SIA dapat menyediakan informasi keuangan yang akurat, andal dan tepat waktu sehingga memiliki kualitas serta dapat meningkatkan kemampuan BLU dalam mengambil keputusan yang bijak, jika tidak dilaksanakan hal ini akan berdampak pada kemajuan BLU.
- 3) Untuk pencapaian kinerja pegawai Poltekkes Kemenkes Pontianak, penting adanya

pembinaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa kompetensi pegawai telah dibangun sedemikian rupa sehingga dapat melakukan prosedur dan metode kerja dengan baik melalui pelatihan dan pengembangan pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hall. James, 2001, *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Ketiga, Penerbit Salemba Empat.
- Afiah , Nunuy Nur. 2014 . *Factors Influencing the Quality Of Financial Reporting and Its Implications on Good Government Governance (Research on Local Government Indonesia)*. International Journal of Business, Economics and Law , Volume 5, Issue 1 (Dec.) ISSN 2289-1552 , 2014.
- Afifuddin dan Saebani, Beni Ahmad. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bastian, Indra, 2011,*Sistem Akuntansi Sektor Publik*, penerbit salemba empat,Jakarta
- Fahma , Dewi Aulia. 2017 .”Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai) “.
- Gondodiyoto, S.,2007,*Audit Sistem Informasi: Pendekatan Cobit*, Edisi Revisi Mitra Wacana Media, Jakarta
- H.B. Sutopo 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.Halaman113
- Hadari Nawawi, (2003)*Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yangKomptitif*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Harahap, Sofyan Syafri. Drs., 2007. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Cetakan ke-7. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Malayu S.P2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung, PT. Bumi Aksa.
- Idrus, M. (2009). *Metode penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT. Gelora Akasara Pratama

- Iman, Sugeng. (2002). *Mengukur dan Mengelola Intellectual Capital. Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*. Editor A. Usmara. Penerbit Amara Books. p. 199-213.
- Koentjaraningrat. (1991). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia
- Mahaputra, P.U.R & Putra, W. 2014. “Analisis Faktor- Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”. *EJurnal Akuntansi Universitas Udayana* 8.2 (2014): 230-244. ISSN: 2302-8556
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yogyakarta*:UPP STIM YKPN.
- Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart. 2014 *Sistem Informasi Akuntansi: Accounting Information Systems* (Edisi 13), Prentice Hall.
- Menteri Keuangan . 2009. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 403/KMK.05/2011 Tentang Penetapan Poltekkes Kemenkes Pontianak sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
- Menteri Keuangan. 2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1994. *Qualitative Data Analysis*. London : Sage Publishers.
- Moeller, Robert R., 2007. *COSO Enterprise Risk Management: Understanding The New Integrated ERM Framework*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Moleong Lexy J, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosda Karya
- Mulyana, Deddy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurillah dan Muid. 2014. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada SKPD Kota Depok)

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pertiwi, Dian. 2016. “Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (spip) dalam mewujudkan good governance pada dispenda provinsi sulawesi selatan”.

Pradono, C.F. & Basukianto . 2015. “ Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: Faktor yang mempengaruhi dan implikasi kebijakan (studi pada skpd pemerintah provinsi jawa tengah) “Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), September 2015, Hal.188 – 200 Vol. 22, No. 2 ISSN: 1412-3126

Pregiwa, Wenda. 2013. “ Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung

Prof. Dr. Nana Syaodih Sukmadinata, 2005,*Landasan Psikologi Proses Pendidikan*,Bandung: PT Rosda Karya.

Pujosuwarno, Sayekti (1992). *Penulisan Usulan dan Laporan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta

Ramadhan, Adi Firman, Ronny K. Moentoro .2013. “Analisis Kendala Implementasi Sistem Informasi Akuntansi pada Perguruan Tinggi Negeri “.

Riduwan. 2004. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Cetakan Pertama. Bandung : Alfabeta

Romney, M.B. dan P.J. Steinbart. 2009 . *Accounting Information System*. 11ed New Jersey : Pearson Education

- Spencer, Lyle M. and Spencer, Signe M. 1993. *Competence at Work: Models for Superior Performance*, New York: John Wiley & Sons.
- Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Sugiyono, 2007, *Metodologi Penelitian Bisnis*, PT. Gramedia, Jakarta
- Syarifudin , Akhmad . 2014 . “Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Studi Empiris pada Pemkab Kebumen)”. *Jurnal Fokus Bisnis Volume 14 , Nomor 2 , Tahun 2014*.
- Udiyanti, Ni Luh Nyoman, Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nyoman Ari Surya Darmawan. 2014. “ Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian intern dan kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada SKPD Kabupaten Buleleng)”. *Ejournal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Volume 2 No. 1. Hal 9-20*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
- Untary , Nurendah Ragillita , Didik Ardiyanto. 2015 .” Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi , Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan faktor eksternal sebagai Pemoderasi (Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang)”. *Diponegoro Journal of Accounting Volume 4, Nomor 2 , Tahun 2015*.
- Widjajanto, Nugroho. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Erlangga: Jakarta
- Wiersma, William, *Research Methods In Education: An Introduction*. Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc,1986.
- Wilkinson, Joseph W. *Sistem Akunting dan Informasi*. Edisi ketiga. Diterjemahkan oleh Agus Maulana. Jakarta. Binarupa aksana, 1993.
- Yin,RobertK.2011.*StudiKasus:Desain dan Metode*.RajagrafindoPersada.Jakarta
- Yudianta, I Gede Agus dan Ni Made Adi Erawati. 2012. “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan “. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Volume 6 No. 1*.